

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

2025

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* sejak tahun 2013 sebagai alat strategis dalam proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Pendekatan ini memastikan seluruh unit organisasi terhubung secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan akhir mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Balanced Scorecard* juga berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi secara efektif dan efisien, dengan berorientasi pada target indikator kinerja yang ditetapkan. Seluruh pencapaian tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 ini memuat gambaran pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tangkap selama satu tahun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 April 2025

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN ditetapkan sebesar **Rp127.049.369.000**. Sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebesar Rp136.489.336.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.668.357.647 atau telah mencapai **3,42%** (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 masuk dalam kategori **Baik**, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar **95,3%**.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja di tahun 2025, dengan rincian capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90	20	25	120
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	%
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79			
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90			
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100			
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87			
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	85	60	70,59
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5			
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88			

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2025)

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja triwulanan yang akan datang. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan diharapkan dapat mendukung kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sistematika Penyajian Laporan.....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	5
2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	8
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	34
BAB IV. PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025	5
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TW I 2025	9
Tabel 4. Capaian IK “Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” Tahun 2024	12
Tabel 5. Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Triwulan I tahun 2025	19
Tabel 6. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP	22
Tabel 7. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	33
Tabel 8. Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	33
Tabel 9. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan I Tahun 2025	34

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kelabuhanan Perikanan Tahun 2025.....</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 2. Dashboard Kinerja Triwulan I tahun 2025 Direktorat Kelabuhanan Perikanan</i>	<i>8</i>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan yang memadai, aman, dan terintegrasi. Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga sebagai simpul penggerak ekonomi daerah dan nasional, serta pusat pelayanan bagi nelayan, industri perikanan, dan masyarakat pesisir.

Seiring dengan tuntutan pertumbuhan industri perikanan yang semakin dinamis, modernisasi sarana dan prasarana pelabuhan, penguatan tata kelola, serta peningkatan pelayanan di pelabuhan perikanan menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing hasil perikanan nasional di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dituntut untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan kinerja dalam merespons berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas, optimalisasi fungsi pelabuhan, hingga adaptasi terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Keberadaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan beserta sektor pendukungnya. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Implementasi pembangunan yang terarah, jelas, terukur, dan akuntabel, serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini memuat capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. Selain sebagai sarana evaluasi dan perbaikan ke depan, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam mendukung pembangunan sektor perikanan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 merupakan media informasi yang menyajikan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama pelaksanaan kegiatan periode triwulan I Tahun

2025. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat menjadi masukan penting serta referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB III Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 110, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan

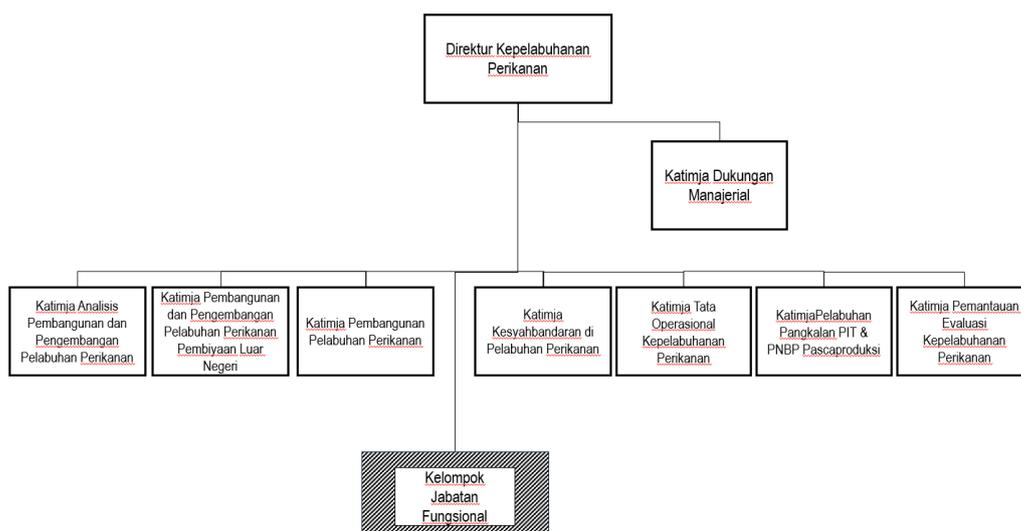
kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan membentuk 8 (delapan) Tim Kerja yang menggambarkan proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari analisis kebutuhan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan Pembangunan pelabuhan perikanan yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri, pelaksanaan fungsi perusahaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengelolaan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur serta mendukung penarikan PNBP Pasca Produksi, analisis dan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dan unsur dukungan manajerial. Struktur organisasi Tim Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, serta dokumen kinerja lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap disusun berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional terkait dengan sektor kelautan dan perikanan dengan rencana strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadiann Berlandaskan Gotong-Royong”;
2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
 - b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
 - c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
 - d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Sasaran kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terdapat 2 Sasaran kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan 19 Indikator Kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1	Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90
		2	Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95

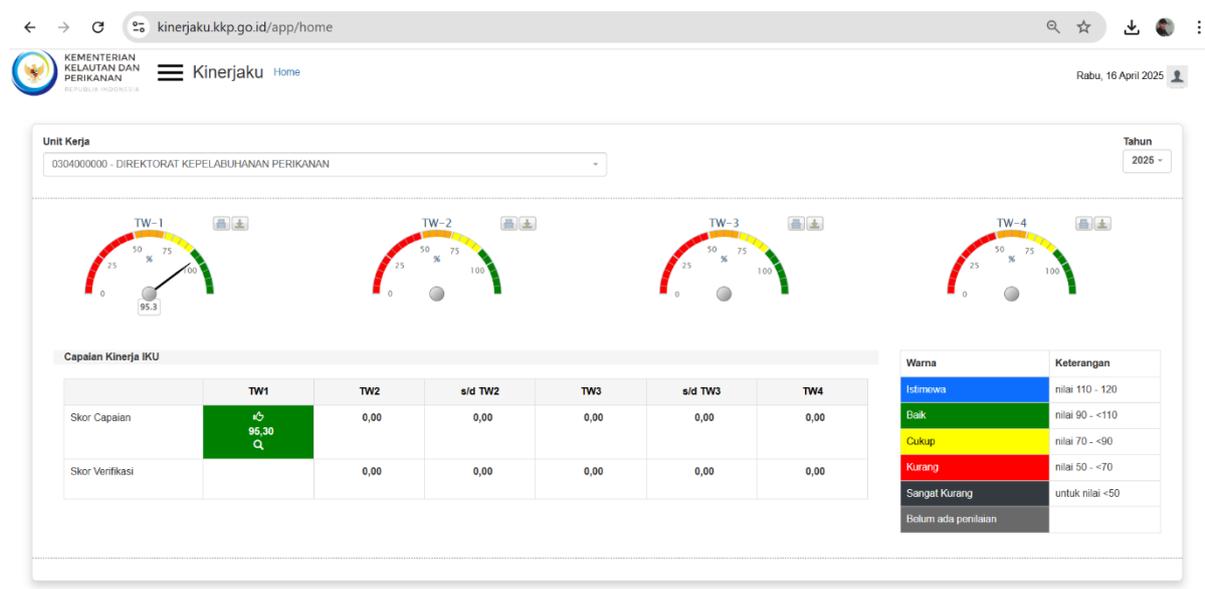
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37
		4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4
		5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5
		6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16
		8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79
		10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78
		11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79
		12	Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90
		13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100
		14	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100
		15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang	16	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85
		18	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5
		19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Triwulan I tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan I tahun 2025 memiliki kategori “**Baik**”, ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **95.3 %**. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada tahun triwulan I Tahun 2025, dari 19 Indikator Kinerja, hanya 2 Indikator Kinerja yang dilakukan perhitungan yaitu Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya, dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TW I 2025

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90	20	25	120
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41			
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	%
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90			
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100			
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87			
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	85	60	70,59
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5			
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88			

3.2. Analis Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu:

1. Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.
2. Persentase Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT.
3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan.
5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum.
6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan.
7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik.
8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).
9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA).
11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan.
13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi.
14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional.
15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Indikator ini menunjukkan persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Capaian pengembangan dan peningkatan fasilitas di pelabuhan perikanan berupa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (**10%**)
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (**15%**).
3. Pembahasan dan Penyiapan Dokumen Kontrak Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (**20%**).
4. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (**10%**).
5. Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (**30%**).
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan (**15%**).

Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” Tahun 2024

SK 1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal											
IK 1 Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)											
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025				Renstra DJPT		
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	6	90	20	25	120	-	-	

Pada triwulan I tahun 2025, Indikator kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya telah mencapai 25%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (**10%**).
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (**15%**).

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa yang anggarannya bersumber dari Hibah Langsung *Japan International Cooperation Agency (JICA)* untuk *Project “The Programme for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands*, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Tahapan Perancangan/Perencanaan Konstruksi, Tahapan Pelaksanaan Konstruksi dan Tahapan Pengawasan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.
2. Adapun posisi proses pengadaan barang/jasa masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan meliputi:

- a. Tahapan Perancangan/Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa
- Proses penetapan dokumen persiapan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 30 Oktober 2024.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung telah dilaksanakan dari tanggal 1 s.d 13 November 2024, dan menetapkan CV. GRIYA PERSADA sebagai pelaksana Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa, dengan nilai kontrak Rp99.529.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - Proses pelaksanaan kontrak pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan menyelesaikan Dokumen Perencanaan dengan BAST pada tanggal 13 Desember 2024.
 - Pembayaran atas pekerjaan telah dilakukan sesuai hasil reuiu Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Surat Inspektur II Nomor R.46/ITJ.2/HP.380/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan surat Permohonan pembayaran 80% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa beserta kelengkapan dokumen pendukung pembayaran.
 - Sisa pembayaran pekerjaan akan dilakukan pada saat selesai tahapan pendampingan tender konstruksi (15%) dan pengawasan konstruksi berkala (5%).
- b. Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa
- Telah dilakukan reuiu Perencanaan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa bersama Tim JICA *Consultant* sesuai dengan surat Plh. Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor B.403/DJPT.4/KU.220/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.
 - Proses penetapan dokumen persiapan tender Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 28 Februari 2025.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Tender telah dilaksanakan dari tanggal 4 s.d 19 Maret 2025, dan menetapkan CV. GOMINA PERMAI sebagai pemenang dan calon pelaksana konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa, dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.987.065.216,26 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu dua ratus enam belas koma dua puluh enam rupiah).

- Sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, telah dilaksanakan Rapat Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia hari Rabu tanggal 9 April 2025 yang tertuang dalam Berita Acara (BA) Rapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melalui Memo Ketua Tim Kerja Pembangunan Pelabuhan Perikanan.
 - Saat ini penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Proses berkontrak kepada calon penyedia masih menunggu sampai dengan adanya penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- c. Tahapan Pengawasan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa
- Proses penetapan dokumen persiapan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 13 Maret 2025.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung dari tanggal 10 s.d 15 April 2025, dan saat ini sudah pada tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Indikator Kinerja (IK) 2 – Persentase Pembangunan SKPT

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progres pembangunan pelabuhan perikanan di SKPT guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Jumlah capaian progress pembangunan pelabuhan perikanan SKPT meliputi:

1. Penyiapan dokumen lelang pembangunan SKPT
2. Penandatanganan kontrak
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan konstruksi
4. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan konstruksi
5. Serah Terima Pekerjaan

Indikator Kinerja Persentase Pembangunan SKPT belum dilakukan perhitungan pada triwulan I tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Pada tahun 2025, Minggu ke – 42 (23 Maret 2025). Capaian realisasi fisik telah mencapai 78,924% dari target tahunan.

Faktor Penentu Keberhasilan

- Ketersediaan modal, ketersediaan tenaga kerja, dan peralatan serta material.

Faktor Penghambat

- Cuaca ekstrem dan gelombang tinggi menyebabkan keterlambatan pengiriman material dan pekerjaan konstruksi.

- Adanya perubahan design yang disebabkan perbedaan kondisi lapangan eksisting dengan perencanaan.

Upaya Mengatasi Hambatan

- Mengatur jadwal pengiriman material dan menyesuaikan kondisi cuaca dengan BMKG.
- Identifikasi design perencanaan dengan kondisi lapangan.
- Menambah tenaga kerja.

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Perencanaan yang matang mencakup seluruh proses awal sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai.
- Pengelolaan tenaga kerja dalam Pembangunan.

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
- b. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau **(Rppa)** pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional **(Rippn)**.

Indikator Kinerja Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan yang ada di RIPPN masih dalam proses permintaan data ke Dinas perikanan dan Kelautan masing-masing daerah. Data yang diminta adalah profil pelabuhan perikanan di masing-masing daerah, usulan pelabuhan perikanan untuk dimasukkan kedalam RIPPN, dan data penunjang lainnya.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan

pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan, sehingga pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.

Faktor Penghambat terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan adalah lambatnya pemberian data yang dibutuhkan dari pemerintah daerah. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini perlu menjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan diantaranya adalah memiliki anggaran yang tersedia dan tepat sasaran dan menjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan.

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Jumlah dokumen perencanaan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan dan DED.

Indikator Kinerja Lokasi rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 Jumlah dokumen perencanaan dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan masih dalam proses pengerjaan dan identifikasi yang meliputi dokumen perencanaan dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan yang dibiayai oleh JICA dan ADB serta menyusun perencanaan kebutuhan ruang dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Persentase pelabuhan dengan tingkat operasional optimum

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- a. Fasilitas minimal pelabuhan perikanan.
- b. Kriteria teknis.
- c. Kriteria operasional.
- d. Kelembagaan.

- e. Sumber Daya Manusia.
- f. Anggaran Operasional.

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan pembahasan dan kunjungan lapangan bersama BBP2MHKP ke PPS Nizam Zachman. Dilakukan pembahasan bersama Perindo terkait rencana Perindo untuk membuat area bongkar muat yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higiiene sesuai standard. bersmaam juga dlakukan penyelesaian pembinaan CPIB pada 1.258 Kapal perikanan yang mensuplai bahan baku ke UE, untuk selanjutnya siap disertifikasi CPIB oleh BP2MHKP.
- Untuk Rancangan Peraturan Menteri terkait konsesi telah dibahas bersama dengan Bag Hukum dan Kemenkeu. Saat ini dalam proses untuk pembahasan kembali terkait mekanisme konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan perikanan yaitu Pengelolaan BMN secara keseluruhan, parsial dan hanya berupa tanah. Untuk mekanisme BLU telah disusun dengan pilot project PPN Kejawnanan. Dokumen telaahan telah dibahas bersama Kemenkeu namun perlu penguatan dari sisi Tusi yang jelas pada UPT Pelabuhan Perikanan.
- Telah diterbitkan Perdirjen No. 45 tahun 2024 tentang Juknis Penangana Kapal tidak beroperasi di kolam pelabuhan dan atau tidak dioperasikan oleh KKP. Perlu dialkukan sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan

Tingkat pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan perintis (31 pelabuhan perikanan)

1. Tingkat kualitas waktu penerbitan pelayanan penerbitan nomor pendaftaran rekomendasi (NPR) calon pembagun dan pengelola SPBUN (bobot 50 %).
2. Tingkat kelengkapan pelaku usaha (TKPU) (bobot 30 %).
3. Pelayanan yang terstandarkan menggunakan SOP(JPS) (bobot 20%).

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Saat ini telah dibuat sistem yang dapat melihat waktu keluar masuk kapal di pelabuhan perikanan untuk kebutuhan pemantauan dan pembayaran tambat labuh yang akurat

(sebagaimana rekomendasi temuan BPK). Pilot project di PPS Cilacap. selanjutnya diperlukan pemaparan ke Dirjen dan eselon 2 lainnya.

- 2 tahun terakhir SELARASKAN telah diimplementasikan pada 22 UPT Pusat dan menjadi IKU Pengendalian Lingkungan bagi UPT Pelabuhan Perikanan. Pada tahun 2024 SELARASKAN telah membawa 8 UPT Pelabuhan mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebagai pelabuhan perikanan bersih dan sehat dari Kemenkes. Selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan versi 3, terkait dengan menu untuk mempermudah melakukan koreksi dan evaluasi hasil.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator adalah 16 %.

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Namun demikian untuk Triwulan I tahun 2025 terdapat 82 Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Triwulan I tahun 2025

NO	PELABUHAN PERIKANAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	RATA-RATA	KATEGORI
1	PPS. Belawan	89,50	90,25	86,25	88,67	Sangat Baik
2	PPS. Bitung	98,00	98,00	91,00	95,67	Sangat Baik
3	PPS. Bungus	90,75	90,75	87,75	89,75	Sangat Baik
4	PPS. Cilacap	89,25	88,50	84,50	87,42	Sangat Baik
5	PPS. Kendari	94,00	91,75	94,00	93,25	Sangat Baik
6	PPS. Nizam Zachman Jakarta	91,75	92,75	97,75	94,08	Sangat Baik
7	PPN. Ambon	87,50	89,25	83,50	86,75	Sangat Baik
8	PPN. Brondong	94,25	92,25	89,25	91,92	Sangat Baik
9	PPN. Idi	76,50	68,50	61,00	68,67	Baik
10	PPN. Karangantu	90,50	90,50	90,50	90,50	Sangat Baik
11	PPN. Kejawan	96,75	94,50	97,75	96,33	Sangat Baik
12	PPN. Kwandang	90,00	91,00	91,00	90,67	Sangat Baik
13	PPN. Muara Angke	72,75	68,75	67,25	69,58	Baik
14	PPN. Palabuhanratu	86,50	87,75	89,50	87,92	Sangat Baik
15	PPN. Pekalongan	96,00	96,00	99,50	97,17	Sangat Baik
16	PPN. Pemangkat	95,25	98,50	94,50	96,08	Sangat Baik
17	PPN. Pengambang	99,50	98,00	98,25	98,58	Sangat Baik
18	PPN. Prigi	96,00	93,75	94,00	94,58	Sangat Baik
19	PPN. Sibolga	98,00	99,00	99,00	98,67	Sangat Baik
20	PPN. Sungailiat	92,25	89,75	89,75	90,58	Sangat Baik
21	PPN. Tanjungpandan	93,00	91,00	93,00	92,33	Sangat Baik
22	PPN. Tasik Agung	97,50	97,50	97,50	97,50	Sangat Baik
23	PPN. Tegalsari	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
24	PPN. Ternate	99,75	93,75	94,75	96,08	Sangat Baik
25	PPN. Tual	85,75	69,00	80,00	78,25	Baik
26	PPP. Asemtoyong	86,75	86,75	86,50	86,67	Sangat Baik
27	PPP. Bacan	93,00	89,00	93,00	91,67	Sangat Baik
28	PPP. Bajomulyo	96,00	98,00	99,00	97,67	Sangat Baik
29	PPP. Batulicin	92,00	93,75	93,75	93,17	Sangat Baik
30	PPP. Bulu	87,00	86,75	86,75	86,83	Sangat Baik
31	PPP. Dobo	72,75	78,00	78,75	76,50	Baik
32	PPP. Karimunjawa	67,25	66,25	69,25	67,58	Baik
33	PPP. Klidang Lor	95,00	99,25	93,25	95,83	Sangat Baik
34	PPP. Kota Agung	73,50	74,50	77,50	75,17	Baik
35	PPP. Labuhan Lombok	87,00	94,50	93,75	91,75	Sangat Baik
36	PPP. Labuhan Maringgai	80,75	79,50	73,50	77,92	Baik

37	PPP. Labuhanhaji	85,50	87,50	78,50	83,83	Baik
38	PPP. Lekok	77,50	76,25	75,25	76,33	Baik
39	PPP. Lempasing	66,50	67,75	80,25	71,50	Baik
40	PPP. Mayangan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
41	PPP. Morodemak	88,50	89,75	91,25	89,83	Sangat Baik
42	PPP. Muncar	84,25	92,50	92,00	89,58	Sangat Baik
43	PPP. Ogotua	54,50	73,25	70,50	66,08	Baik
44	PPP. Pondok Dadap	91,50	94,00	93,25	92,92	Sangat Baik
45	PPP. Puger	56,75	87,75	84,50	76,33	Baik
46	PPP. Sadeng	77,75	75,75	60,75	71,42	Baik
47	PPP. Sorong	67,00	69,50	71,00	69,17	Baik
48	PPP. Sungai Rengas	93,00	86,75	89,25	89,67	Sangat Baik
49	PPP. Tamperan	69,00	96,25	88,50	84,58	Baik
50	PPP. Tawang	86,25	86,25	87,75	86,75	Sangat Baik
51	PPP. Teluk Batang	92,50	90,00	81,00	87,83	Sangat Baik
52	PPP. Tumumpa	88,50	87,50	87,25	87,75	Sangat Baik
53	PPP. Wonokerto	89,75	91,75	91,50	91,00	Sangat Baik
54	PPI. Banjarmasin	66,25	69,00	73,75	69,67	Baik
55	PPI. Donggala	87,50	88,25	88,25	88,00	Sangat Baik
56	PPI. Gentuma	67,75	66,50	64,00	66,08	Baik
57	PPI. Kuala Pembuang	68,00	69,00	67,00	68,00	Baik
58	PPI. Larangan	93,00	89,50	96,00	92,83	Sangat Baik
59	PPI. Muara Kintap	73,75	70,25	74,25	72,75	Baik
60	PPI. Pasongsongan	68,00	66,75	65,00	66,58	Baik
61	PPI. Pusong	86,50	86,50	86,50	86,50	Sangat Baik
62	PPI. Sambaliung	81,75	84,75	74,75	80,42	Baik
63	PPI. Selili	80,50	78,75	74,00	77,75	Baik
64	PPI. Tanjung Limau	87,00	87,00	87,00	87,00	Sangat Baik
65	PPI. Tanjung Luar	84,50	87,00	89,25	86,92	Sangat Baik
66	PPI. Tenda	70,75	70,75	69,75	70,42	Baik
67	PPI. Ujong baroeh	62,00	62,00	78,50	67,50	Baik
68	PP. Api-Api	70,50	73,50	69,75	71,25	Baik
69	PP. Camplong	69,75	66,75	70,75	69,08	Baik
70	PP. Karangsong	65,50	65,50	67,50	66,17	Baik
71	PP. Kema	70,75	62,75	65,75	66,42	Baik
72	PP. Keude Meukek	83,50	84,50	73,25	80,42	Baik
73	PP. Kuala Peukan Baro	69,50	73,50	77,00	73,33	Baik
74	PP. Logending	88,50	89,75	91,50	89,92	Sangat Baik
75	PP. Manggar Baru	92,25	92,25	92,00	92,17	Sangat Baik
76	PP. Popoh	90,75	89,25	91,25	90,42	Sangat Baik
77	PP. Sangatta	79,50	79,50	79,50	79,50	Baik
78	PP. Sawang Ba'u	71,00	72,50	74,50	72,67	Baik
79	PP. Sebatik	86,25	87,25	90,25	87,92	Sangat Baik

80	PP. Tambakrejo	82,00	84,25	83,00	83,08	Baik
81	PP. Teluk Awang	92,00	91,75	94,00	92,58	Sangat Baik
82	PP. Untia	84,00	88,00	90,00	87,33	Sangat Baik

- Faktor Penentu Keberhasilan dari tercapai IK ini adalah:
 - o Keaktifkan petugas pelabuhan perikanan untuk menginput data kedalam aplikasi Pusat Informasi Kepelabuhanan Perikanan
 - o Peningkatan pelayanan petugas untuk kegiatan pendataan produksi ikan hasil tangkapan, penerbitan persetujuan berlayar, dan laporan kedatangan kapal di pelabuhan perikanan
 - o Pemanfaatan sistem informasi TemanSPB, elogbook, dan lain- lain untuk operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan
 - o Penyediaan dan perbaikan fasilitas pokok, penunjang, fungsional pelabuhan perikanan

- Faktor Penghambat
 - Tidak ada Sumberdaya Manusia di Pelabuhan Perikanan
 - Kurangnya anggaran untuk operasional dan Pembangunan /perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan
 - Rendahnya kompetensi petugas pelabuhan perikanan

- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat
 - Melakukan sosialisasi /pembinaan /bimbingan teknis ke pelabuhan perikanan
 - Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan dan perbaikan fasilitas di pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 8 – Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah yang melayani kapal perikanan laut dan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, selain yang berstatus Calon Pelabuhan (CP), yang tergabung dengan aplikasi PIPP. Target indikator kinerja ini sebesar 41%. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan yang terintegrasi PIPP dibagi dengan jumlah pelabuhan perikanan dalam RIPPN No. 132/2023 sebanyak 455 lokasi.

IK Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Namun demikian untuk periode Triwulan I tahun 2025 terdapat sebanyak 266 pelabuhan perikanan yang telah terintegrasi dengan PIPP sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
1	PPS. Belawan	49	PPP. Morodemak	97	PPI. Rangai
2	PPS. Bitung	50	PPP. Muara Ciasem	98	PPI. Sambaliung
3	PPS. Bungus	51	PPP. Muara Sungai Baturusa	99	PPI. Sasak
4	PPS. Cilacap	52	PPP. Muncar	100	PPI. Selili
5	PPS. Kendari	53	PPP. Ogotua	101	PPI. Sikakap
6	PPS. Lampulo	54	PPP. Paiton	102	PPI. Sodohoa
7	PPS. Nizam Zachman Jakarta	55	PPP. Pondok Dadap	103	PPI. Sungai Selan
8	PPN. Ambon	56	PPP. Puger	104	PPI. Sungsang
9	PPN. Brondong	57	PPP. Pulau Baai	105	PPI. Tanjung Balai Asahan
10	PPN. Idi	58	PPP. Sadeng	106	PPI. Tanjung Limau
11	PPN. Karangantu	59	PPP. Sorong	107	PPI. Tanjung Luar
12	PPN. Kejawanan	60	PPP. Sungai Rengas	108	PPI. Teluk Santong
13	PPN. Kwandang	61	PPP. Tamperan	109	PPI. Tenda
14	PPN. Merauke	62	PPP. Tawang	110	PPI. Tiku
15	PPN. Muara Angke	63	PPP. Teladas	111	PPI. Tilamuta
16	PPN. Palabuhanratu	64	PPP. Teluk Batang	112	PPI. Ujong baroeh
17	PPN. Pekalongan	65	PPP. Tobelo	113	PPI. Ujung Serangga
18	PPN. Pemangkat	66	PPP. Tumumpa	114	PP. Aimere
19	PPN. Pengambengan	67	PPP. Wonokerto	115	PP. Ampana
20	PPN. Prigi	68	PPI. Air Bangis	116	PP. Amurang
21	PPN. Sibolga	69	PPI. Banda	117	PP. Anak Laut
22	PPN. Sungailiat	70	PPI. Banjarmasin	118	PP. Api-Api
23	PPN. Tanjungpandan	71	PPI. Bawean	119	PP. Atep Oki
24	PPN. Tasik Agung	72	PPI. Birea	120	PP. Bahaur
25	PPN. Tegalsari	73	PPI. Bonehalang	121	PP. Banyusangkah
26	PPN. Ternate	74	PPI. Carocok Tarusan	122	PP. Baran
27	PPN. Tual	75	PPI. Donggala	123	PP. Bareleng
28	PPP. Asemtoyong	76	PPI. Dumai	124	PP. Batu Tulis
29	PPP. Bacan	77	PPI. Gentuma	125	PP. Beba
30	PPP. Bajomulyo	78	PPI. Kalianda	126	PP. Belang
31	PPP. Batulicin	79	PPI. Kambang	127	PP. Bengkumat
32	PPP. Blanakan	80	PPI. Kedonganan	128	PP. Benjina
33	PPP. Bondet	81	PPI. Ketapang	129	PP. Binuangeun

34	PPP. Bulu	82	PPI. Kotabaru	130	PP. Bonto Bahari Bulukumba
35	PPP. Cilauteureun	83	PPI. Kuala Pembuang	131	PP. Bonto Bahari Maros
36	PPP. Ciparage	84	PPI. Kuala Penet	132	PP. Camplong
37	PPP. Dobo	85	PPI. Kumai	133	PP. Campurejo
38	PPP. Eretan (Wetan/Kulon)	86	PPI. Larangan	134	PP. Cempae
39	PPP. Karimunjawa	87	PPI. Manggar	135	PP. Cikeusik
40	PPP. Klidang Lor	88	PPI. Muara Kintap	136	PP. Cikidang
41	PPP. Kota Agung	89	PPI. Muara Piluk Bakauheni	137	PP. Cisolok
42	PPP. Labuan	90	PPI. Pagimana	138	PP. Cituis
43	PPP. Labuhan Lombok	91	PPI. Palipi	139	PP. Dadap
44	PPP. Labuhan Maringgai	92	PPI. Paranggi	140	PP. Daeo Majiko
45	PPP. Labuhanhaji	93	PPI. Pasongsongan	141	PP. Dagho
46	PPP. Lekok	94	PPI. Peudada	142	PP. Dodepo
47	PPP. Lempasing	95	PPI. Pulau Tello	143	PP. Dompok
48	PPP. Mayangan	96	PPI. Pusong	144	PP. Dufa-Dufa

NO	PELABUHAN PERIKANAN
145	PP. Dulanpokpok
146	PP. Eri
147	PP. Falabisahaya
148	PP. Fandoi
149	PP. Gantung
150	PP. Gebang Mekar
151	PP. Gesing
152	PP. Goto
153	PP. Grajagan
154	PP. Hamadi Jayapura
155	PP. Ie Meulee
156	PP. Inengo
157	PP. Jakabaring
158	PP. Jayanti
159	PP. Kajang
160	PP. Kalar Kalar
161	PP. Karanganyar
162	PP. Karangsong
163	PP. Kasiwa (Kasiwah)
164	PP. Kema

NO	PELABUHAN PERIKANAN
193	PP. Marisa
194	PP. Masami
195	PP. Masarete
196	PP. Masohi
197	PP. Meureudu
198	PP. Minajaya
199	PP. Minaminanga
200	PP. Moro
201	PP. Namatota
202	PP. Ngemplakrejo
203	PP. Oeba
204	PP. Pal Jaya
205	PP. Pamayangsari
206	PP. Pancer
207	PP. Panimbang
208	PP. Pante Raja
209	PP. Paotere
210	PP. Pasarwajo
211	PP. Pasir Baru
212	PP. Piru

NO	PELABUHAN PERIKANAN
241	PP. Sungai Kakap
242	PP. Surantiah
243	PP. Tambakrejo
244	PP. Tamher Timur
245	PP. Tamping
246	PP. Tandoleo
247	PP. Tanjung Sari
248	PP. Tanjungsari
249	PP. Teluk Awang
250	PP. Teluk Sinabang (Lugu)
251	PP. Tenau Kupang
252	PP. Tengkeyu II
253	PP. Tiley
254	PP. Torobulu
255	PP. Tual
256	PP. Tulehu
257	PP. Ujung Batu
258	PP. Ujung Blang
259	PP. Ukurlaran
260	PP. Ulu

165	PP. Ketapang (Banyuwangi)	213	PP. Pontap	261	PP. Untia
166	PP. Keude Meukek	214	PP. Popoh	262	PP. Wainin
167	PP. Kijang Bintang	215	PP. Poumako	263	PP. Waiya Depapre
168	PP. Klademak	216	PP. Pulokali	264	PP. Waiyoho
169	PP. Kluwut	217	PP. Pulolampes	265	PP. Wameo
170	PP. Kolonodale	218	PP. Rancabuaya	266	PP. Wetar
171	PP. Kronjo	219	PP. Rigah		
172	PP. Krueng Mane	220	PP. Rumbia Tengah		
173	PP. Kuala Jelai	221	PP. Sadai		
174	PP. Kuala Mempawah	222	PP. Salibabu		
175	PP. Kuala Peukan Baro	223	PP. Sampolawa		
176	PP. Kuala Stabas Krui	224	PP. Sangatta		
177	PP. Kuala Tari	225	PP. Sanggeng		
178	PP. Kuala Tuha	226	PP. Sape		
179	PP. Kuala Tungkal	227	PP. Sarang		
180	PP. Kurau	228	PP. Sawang Ba'u		
181	PP. Lambada	229	PP. Sebatik		
182	PP. Lappa	230	PP. Selakau		
183	PP. Lasolo	231	PP. Selat Lampa		
184	PP. Lero	232	PP. Selat Nasik		
185	PP. Lhok Bengkuang	233	PP. Sine		
186	PP. Likupang	234	PP. Singkawang		
187	PP. Logending	235	PP. Soro Kempo		
188	PP. Lonrae	236	PP. Soroadu		
189	PP. Lontar	237	PP. Soropia		
190	PP. Maccinibaji	238	PP. Suka Bangun Ketapang		
191	PP. Manggar Baru	239	PP. Sungai duri		
192	PP. Manitinting	240	PP. Sungai Jawi		

Faktor Penentu Keberhasilan dari tercapai IK ini adalah:

- Peran serta aktif dari pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan perikanan untuk turut menggunakan Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan perikanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Penempatan enumerator pendataan dari Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)/pengolah data untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
- Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan untuk lebih memudahkan dalam penggunaannya dan meningkatkan pemanfaatannya oleh para pengguna.
- Penyediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan PIPP.

Faktor Penghambat

- Masih terdapat pemerintah daerah yang belum menggunakan aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
- Kurangnya Sumberdaya Manusia dan anggaran untuk operasional pelabuhan perikanan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.
- Aplikasi PIPP agar lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan serta mengakomodir berbagai kebutuhan semua pihak dan perkembangan teknologi informasi.
- Kompetensi petugas PIPP yang masih harus terus ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat

- Mengusulkan anggaran Bimbingan Teknis Pusat informasi Pelabuhan Perikanan melalui dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, serta anggaran GEF.
- Pengembangan aplikasi PIPP.

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Penyediaan anggaran untuk Bimbingan Teknis dan pengembangan aplikasi PIPP,
- Penyediaan Sumberdaya Manusia enumerator/pengolah data PIPP.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Indikator Kinerja Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

1. Pada triwulan I, telah diterapkan kesyahbandaran di 238 Pelabuhan Perikanan, namun terdapat baru 170 Pelabuhan Perikanan yang telah menerapkan TemanSPB dan tercatat total penerbitan STBLKK sebanyak 40850 lembar dan SPB sebanyak 38.722 lembar.
2. Updating akun TemanSPB pada beberapa Pelabuhan Perikanan.
3. Dalam rangka pemenuhan SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan guna mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi telah dilaksanakan beberapa hal yakni:
 - a. Telah terbit surat Menteri Kelautan dan Perikanan Kepada Menteri Perhubungan No.B.200/MEN-KP/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Usulan Pengukuhan/Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;

- b. Rapat Pembahasan persiapan rencana pengukuhan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Kamis 6 Maret 2025 secara daring yang dibuka oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan dipimpin oleh Kasubdit Tertib Bandar serta dihadiri oleh perwakilan Kemenhub (Biro Hukum, Biro Kepegawaian, Dit.KPLP, Kepala BP2TL Jakarta, Bagian SDMA Setditjen Hubla, Bagian Hukum Setditjen Hubla), perwakilan KKP (Biro Hukum, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan).
4. Rapat Pembahasan Rancangan revisi Peraturan Menteri KP No.3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan mengundang Biro Hukum, Itjen KKP, Timja Hukum Setditjen PT, beberapa perwakilan Syahbandar, Dit. PSDI, Dit. KAPI, Dit. PDK dan Timja lingkup Dit. KP.
5. Terdapat beberapa penghambat dalam merealisasikan kegiatan pada triwulan I antara lain dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.
6. upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut adalah akan dilakukan pengusulan melalui anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri.

Indikator Kinerja (IK) 10 – Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)*

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendera asing yang di layani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu:

- a. Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam mendukung Indikator Kinerja ini sebagai berikut:

1. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selaku Sekretariat Otoritas PSM di Indonesia telah menerbitkan 18 Notifikasi Penerimaan Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan terhadap 16 Kapal Perikanan Berbendera Jepang. Adapun tujuan kapal – kapal berbendera Jepang dan Rusia tersebut masuk ke Pelabuhan yang telah ditetapkan adalah dalam rangka untuk pergantian crew, pengisian perbekalan dan BBM sementara. Hasil pemeriksaan PSM ke-18 kapal perikanan berbendera asing tersebut telah dilaporkan dan disampaikan kepada PSMA Sekretariat - *Food and Agriculture*

Organization, negara bendera dan organisasi perikanan regional terkait melalui aplikasi GIES.

2. Dalam rangka pemenuhan SDM Petugas Pemeriksa Kapal Asing, telah mengirimkan 2 orang sebagai delegasi untuk mengikuti Pelatihan Petugas PSM di Thailand yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Seafdec.
3. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PSM pada triwulan I, yakni:
 - a. Terbatasnya jumlah pelabuhan sebagai tempat pelaksanaan PSMA.
 - b. Masih terbatasnya jumlah Petugas PSM yang dikarenakan adanya rotasi beberapa Petugas ke Pelabuhan yang lain.
 - c. Terbatasnya sarana pendukung dalam rangka pelayanan pemeriksaan kapal asing di Pelabuhan yang telah ditetapkan.
4. beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut, diantaranya adalah
 - a. telah dilakukan rapat rapat pembahasan usulan penambahan Pelabuhan untuk penerapan Port State Measures Agreement (PSMA) pada tanggal 18 Februari 2025 di ruang rapat breakwater secara hybrid antara perwakilan KKP dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan koordinasi dengan Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut.
 - b. usulan perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52/KEPMEN-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur telah disampaikan ke Setditjen PT melalui Memorandum Dir. KP No. 602/DJPT.4/PI.310/III/2025 tanggal 6 Maret 2025.
 - c. Pelatihan penggunaan ARPE pada aplikasi GIES oleh Sekretariat PSMA FAO dan Pelatihan penggunaan GIES kepada Inspektor oleh Sekretariat Otoritas PSM

Indikator Kinerja (IK) 11 – Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksananan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

- a. Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%.
- c. Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksananan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, pelaksanaan SHTI telah melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Penerapan SHTI telah dilaksanakan 28 OKL dan 47 pelabuhan perikanan penerbit Lembar Awal, dengan perkembangan SHTI LT sebanyak 7.094 dokumen dan SHTI LTS sebanyak 1.0301 dokumen dan LA-A sebanyak 7.602 dokumen, dan LA-B sebanyak 22.286 dokumen.
2. Penyampaian tanggapan atas permintaan verifikasi keabsahan dokumen SHTI dari negara tujuan ekspor (Yunani, Spanyol, Belanda, Belgia dan Italia).

Hal - hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan SHTI, diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran.
2. Masih terdapat kapal yang tidak terdaftar di RFMO namun melakukan penangkapan di wilayah konvensi RFMO.
3. *Database* aplikasi SHTI dan penyesuaiannya dengan ketentuan terbaru di UE.
3. Upaya yang dilakukan guna mengatasi penghambat tersebut diantaranya adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut adalah akan dilakukan pengusulan melalui anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Tingkat Penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang Ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Penangkapan Ikan Terukur, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Pasal 89 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur.

Sebagai upaya awal untuk perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan kuota di pelabuhan pangkalan dimaksud, maka diperlukan perbaikan dari data, terutama adalah data produksi perikanan yang merupakan salah satu instrumen yang sangat berperan dalam penentuan kuota tangkapan. Direktorat Tangkap telah melakukan terobosan dalam rangka perbaikan data dimaksud salah satunya adalah dengan adanya perubahan kebijakan penarikan PNBP Praproduksi menjadi PNBP Pasca Produksi dengan tetap merujuk peraturan yang berlaku.

Kebijakan Penarikan PNBP Pasca Produksi dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan berupa pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan,

yang semula diberlakukan melalui penarikan pra produksi menjadi penarikan pasca produksi. Implementasi kebijakan ini, mulai diterapkan sejak 1 Januari 2023.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam perikanan oleh kapal-kapal penangkapan ikan berizin pusat dilaksanakan pada daerah penangkapan ikan pada 11 WPP-NRI dan Laut Lepas yang didaratkan pada pelabuhan pangkalan sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan berusaha penangkapan ikan yang diberikan. Pelabuhan pangkalan tersebut tidak hanya pelabuhan perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah, namun terdapat juga pelabuhan pangkalan bukan pelabuhan perikanan (pelabuhan umum), dan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah (swasta).

Ketersediaan sumber daya manusia di pelabuhan pangkalan untuk melakukan pendataan produksi ikan untuk melaksanakan penarikan PNBP Pascaproduksi serta pendataan dalam rangka pelaporan operasional pelabuhan pangkalan saat ini belum memadai, sehingga Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bermaksud untuk melakukan penyediaan Enumerator Kelautan dan Perikanan di pelabuhan pangkalan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, pada Pasal 1 Enumerator Kelautan dan Perikanan adalah petugas non-aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pengolahan, analisis, dan pendokumentasian data di bidang kelautan dan perikanan.

Kriteria yang dipenuhi oleh pelabuhan pangkalan dalam pelaksanaan PNBP Pasca Produksi yaitu:

1. Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pasca (Ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM)
2. Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca (Jumlah kapal yang kontribusi/ kapal izin pusat (ijin pasca)
3. Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal ikan izin pusat (Perbandingan pelabuhan perikan yang menyapaikan data dengan kepatuhan input di PIPP)

Indikator Tingkat Penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang Ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, dalam rangka memenuhi tingkat penerapan diatas telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut

1. Proses rekrutment untuk SDM enumerator kelautan dan Perikan di pelabuhan pangkalan telah diadakan melalui pengadaan jasa lainnya perorangan. Sejumlah 440 orang Enumerator Kelautan dan Perikanan telah di tempatkan di 84 Pelabuhan Pangkalan.

2. Selain Enumerator Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan pangkalan juga telah ditempatkan ASN dari masing-masing pelabuhan pembina sebagai penanggung jawab.
3. Dalam rangka pemenuhan SDM di pelabuhan pangkalan pada saat menjelang Hari Raya juga dilaksanakan kerjasama dengan Universitas Panca Sakti Tegal terkait dengan penempatan mahasiswa magang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari. Faktor penentu keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini adalah terpenuhinya ketersediaan SDM di pelabuhan Pangkalan, kepatuhan dan pelaku usaha dan ketertiban dari enumerator kelautan dan perikanan dalam melakukan input data produksi yang didaratkan kedalam aplikasi PIPP Mobile serta berjalannya Proses bisnis level 3.

Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat dari tercapainya indikator kinerja ini adalah kurangnya Sumberdaya Manusia termasuk didalamnya adalah enumerator kelautan dan perikanan di pelabuhan pangkalan, sehingga memungkinkan adanya data pendaratan yang tidak tercatat serta kepatuhan dari pelaku usaha untuk membayar LPS.

Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja diatas antara lain adalah, dilakukannya pendampingan di pelabuhan pangkalan oleh ASN dari pusat walaupun dengan jumlah orang dan hari yang sangat terbatas pada saat menjelang hari raya dimana berdasarkan trend sebelumnya tingkat pendaratan di elabuhan pangkalan sedang mengalami peningkatan yang signifikan.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi adalah pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a. Lokasi pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. PNBP Pascaproduksi pada pelabuhan pangkalan telah direalisasikan.

Indikator Kinerja Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah dilakukan koordinasi dan kompilasi dari pemerintah daerah untuk dapat melakukan update atas pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi. Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 posisi jumlah pelabuhan pangkalan masih sejumlah 296 pelabuhan pangkalan dimana berdasarkan data ada 126 Pelabuhan Pangkalan yang telah aktif terdapat Penarikan PNBP Pasca Produksi.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port*

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port* pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu:

- IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indeksi Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN di Indonesia. Indeks ini dikembangkan oleh Badan

Kepegawai Negara (BKN) sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana ASN menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran.
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pengukuran.

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada tahun 2025 targetnya ditetapkan sebesar 87, dengan perhitungannya dilakukan dalam waktu semesteran, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan perhitungan. Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat Kepelabuhanan telah menerapkan langkah-langkah konkrit, diantaranya mendorong PNS untuk mengikuti pelatihan maupun diklat, serta memberikan bimbingan untuk melakukan pengkinian atau mengunggah sertifikat pelatihan dan diklat yang telah diikuti ke dalam aplikasi MyASN.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada triwulan I Tahun 2024 s.d triwulan III Tahun 2025 yang dokumennya telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Tabel 6. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

SK 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan										
IK 17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)										
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025				Renstra DJPT		
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-		85	85	60	70,59	-	-	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Pada triwulan I Tahun 2025, capaian IK ini adalah 60% dari target 85%, dengan persentase capaian 70,59%. Rekapitulasi laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun pada triwulan I Tahun 2025 periode Oktober 2024-Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

No	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OKTOBER 2024												
1	R.476/ITJ.2/HP.550/XI/2024	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut DG Sante Triwulan III pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	1	2	-	-	1	-	1	1	-	PROSES
DESEMBER 2024												
2	R.606/ITJ.2/HP.130/XII/2024	Hasil Probit Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Pelabuhan Perikanan le Meulee Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh	4	8	-	3	5	-	1	3	-	PROSES

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat 2 (dua) kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan, terdapat 10 (sepuluh) temuan dan 6 (enam) saran yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga terdapat sisa temuan sebanyak 4 (empat) saran yang perlu ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **136,489,336,000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2024. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.668.357.647 atau sebesar 3,42% dari total pagu anggaran 2025.

Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Indikator Kinerja (IK) 19 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

Nilai PM SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kepelabuhanan.

Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **136,489,336,000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2024. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.668.357.647 atau sebesar 3,42% dari total pagu anggaran 2025.

Tabel 8. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran TW I 2025	Realisasi Anggaran TW I 2025	NPSS	% Realisasi Anggaran
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggungjawab	136,489,336,000	4.668.357.647	120	3,42
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	-	-	70,59	-

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa ada dua Indikator Kinerja yang perhitungannya dilakukan pada triwulan I, yaitu:

1. Persentase Pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen), dari target yang ditetapkan sebesar 20%, telah tercapai pada triwulan I sebesar 25%. Capaian tersebut meliputi:
 - a. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%), dan**
 - b. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(15%)**

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen) dari target yang ditetapkan sebesar 85%, telah tercapai 60%. Capaian dimaksud merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal melalui aplikasi SIDAK untuk periode bulan Oktober – Desember 2024. Dari temuan yang direkomendasikan untuk diselesaikan sejumlah 10 rekomendasi meliputi:
 - a. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut DG Sante Triwulan III pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
 - b. Hasil Probity Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ie Meulee Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh.

Dari rekomendasi tersebut, 6 diantaranya telah selesai ditindaklanjuti.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena memerlukan proses penyiapan bahan yang juga ada keterlibatan dari pihak *stakeholder* terkait, sehingga waktu yang dibutuhkan melampaui batas proses otorisasi dari Inspektorat Jenderal untuk penilaian hasil pengawasan periode Triwulan 1 tahun 2025.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPSELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tri Aris Wibowo**

Jabatan : Direktur Kepelabuhanan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

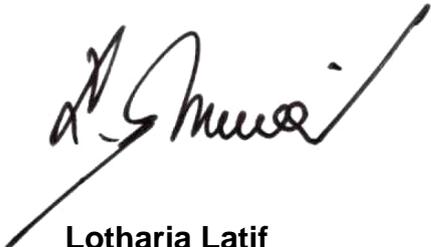
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



Lotharia Latif



Tri Aris Wibowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1	Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90
		2	Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95
		3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37
		4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4
		5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5
		6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16
		8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79
		10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78
		11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79
		12	Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90
		13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100
		14	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100
		15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan	100

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	16	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85
		18	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5
		19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88

Data Anggaran:

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.846.679.000
Total Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan		184.846.679.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Tri Aris Wibowo

2	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kelelabuhanan Perikanan	16	IP ASN Direktorat Kelelabuhanan Perikanan (indeks)	87	DUKMAN	Monitoring pengembangan kompetensi pegawai Direktorat Kelelabuhanan Perikanan	0	-	2	Dokumen					1					1	
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kelelabuhanan Perikanan (Persen)	85		Koordinasi penyusunan dokumen Tindak Lanjut Temuan LHP Inspektorat Jenderal KKP Lingkup Direktorat Kelelabuhanan Perikanan	0	-	4	Dokumen			1			1			1		1
		18	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kelelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5		Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Direktorat Kelelabuhanan Perikanan	0	-	4	Dokumen			1			1			1		1
		19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kelelabuhanan Perikanan (Nilai)	88	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Direktorat Kelelabuhanan Perikanan	0	-	1	Dokumen												1

Jakarta, April 2025
Direktur Kelelabuhanan Perikanan,

Ady Candra